

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DALAM *INTERNATIONAL  
CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL  
MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES* PADA  
UU NO. 18 TAHUN 2017 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Disusun oleh :**

**MUHAMMAD IQBAL  
NIM : 201510380211015**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
September 2020**

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DALAM  
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE  
PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT  
WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES  
PADA UU NO. 18 TAHUN 2017 DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI  
LUAR NEGERI**

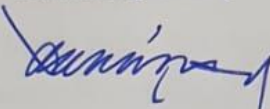
Diajukan oleh :

**MUHAMMAD IQBAL**  
**201510380211015**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jumat / 11 September 2020**

Pembimbing Utama .

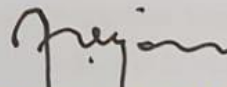


**Mokh. Najih, Ph.D**

Direktur  
Program Pascasarjana

**Prof. Akhsanul In'am, Ph.D**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Fikri Widyani, S.H., M.H.**

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Mokh. Najih, Ph.D**



# **T E S I S**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**MUHAMMAD IQBAL**

201510380211015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Jumat/ 11 September 2020  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## **SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: Mohk. Najih, Ph.D</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.H.</b>
<b>Penguji I</b>	<b>: Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H.</b>
<b>Penguji II</b>	<b>: Dr. Herwastoeti, S.H., M.H.</b>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillah* puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perogram Magister Ilmu Hukum ini dengan judul : **“Implementasi Prinsip-Prinsip dalam *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”**

Penyusunan tesis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai rangkaian kegiatan akademik lainnya dalam lingkup Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum. Rampungnya penyusunan tugas akhir tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bapak Akhsanul In'am, Ph.D., Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Mokh. Najih, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Mokh. Najih, Ph.D. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk membimbing dan memberi motivasi kepada penyusun dalam proses penyusunan tesis ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Magister Ilmu Hukum, saya haturkan banyak terimakasih atas ilmu dan motivasi yang diberikan kepada penyusun selama menempuh pendidikan, sembari memohon maaf apabila ada ucapan, sikap, dan perilaku yang tidak berkenan dari penyusun selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Bapak Syarif Mansyur Maruapey dan Ibu Yetti Ivone serta Ibu Arindrawarti Santi Sita sebagai orang tua penyusun, saya mengucapkan banyak terimakasih atas segala do'a dan dukungan serta motivasinya kepada penyusun, sebagai anak

penyusun juga memohon maaf atas segala kesalahan baik ucapan dan tingkah laku selama ini sembari memohon doa yang tak pernah putus kepada penyusun;

7. Marsyareta Fitriani dan Muhammad Zaki Naufalino sebagai istri dan anak, terimakasih telah menjadi energi dan motivasi bagi penyusun baik langsung maupun tidak langsung sehingga tesis ini bisa rampung, untuk Naufal semoga karya papa ini bisa menjadi motivasi bagimu kelak dimasa depan untuk tetap semangat dalam belajar dan meraih mimpi;
8. Seluruh staff bidang administrasi di Direktorat Program Pascasarjana, Badan Administrasi Akademik, Badan Administrasi Keuangan, dan seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang. Terimakasih atas semua keramahan dan bantuan dibidang proses administrasi serta pengadaan bahan literasi, terkhusus untuk mbak Risma, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu dan mempermudah proses penyelesaian tesis ini;
9. Bapak Happy Mei Ardeni sebagai kepala BP2MI Surabaya, terimakasih atas dukungan selama ini kepada penyusun secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusun memperoleh fleksibilitas yang cukup untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, semoga budi baik Bapak/Ibu/Saudara/i mendapat balasan amal terbaik dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa akan ada pro dan kontra dari para pembaca tesis ini. Baik dari sisi penyajian, penyusunan, dan/atau pembahasannya, hal itu tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan penyusun sebagai manusia biasa. Oleh karena itu penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga karya tesis ini dapat memberikan manfaat dalam bidang akademik dan praktek ilmu hukum berapapun kecilnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT serta selamat di dunia dan di akhirat. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Banyuwangi, 12 Agustus 2020

Penyusun,

Muhammad Iqbal, S.H.  
201510380211015

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Daftar Penguji .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	vii
Surat Pernyataan .....	viii
Abstraksi .....	ix
Abstract .....	x
I. PENDAHULUAN .....	1
II. RUMUSAN MASALAH .....	4
III. TINJAUAN PUSTAKA .....	5
IV. METODE PENELITIAN .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Pendekatan Masalah .....	9
3. Bahan Hukum .....	9
4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	10
V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	10
A. Prinsip-Prinsip yang Terkandung dalam <i>Internasional Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i> .....	10
B. Implementasi Prinsip-Prinsip Konvensi dalam UU No. 18 Tahun 2017 .....	22
VI. PENUTUP .....	38
A. Kesimpulan .....	38
B. Saran .....	39
DAFTAR PUSTAKA .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarga di dalam Konvensi .....	16
Tabel 5.2	Hak Pekerja Migran Berdokumen dan Keluarga di dalam Konvensi .....	20
Tabel 5.3	Kewajiban Negara Asal Pekerja Migran di dalam Konvensi .....	22
Tabel 5.4	Kewajiban Seluruh Negara Para Pihak Terkait Pekerja Migran dan Keluarga di dalam Konvensi .....	24
Tabel 5.5	Implementasi Prinsip-Prinsip Konvensi dalam UU No. 18 Tahun 2017 .....	29
Tabel 5.6	Pelaksanaan LTSA di Banyuwangi .....	42





## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD IQBAL

NIM : 201510380211015

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DALAM INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES PADA UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 12 Agustus 2020

kan,

METERAI  
TEMPEL  
Rp574AHE710089263  
6000  
RUPIAH

MUHAMMAD IQBAL



## ABSTRAKSI

Nama : MUHAMMAD IQBAL  
NIM : 201510380211015  
Email : iqbal.maruapey@gmail.com  
Judul : **IMPLEMENTASI PRINSIP - PRINSIP DALAM  
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF  
THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS  
OF THEIR FAMILIES PADA UU NO. 18 TAHUN 2017 DALAM  
UPAYA PERLINDUNGAN PMI DI LUAR NEGERI**

Pembimbing : 1. Mokh. Najih, Ph.D. (NIDN. 0017056501)  
2. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.H. (NIDN. 0028056701)

## ABSTRAK

Adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan menjadikan peluang kerja ke luar negeri menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran. Proses migrasi orang Indonesia sendiri sudah dimulai sejak lama bahkan sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Sektor-sektor yang dibuka diluar negeri dengan akseptansi tinggi pada warga negara Indonesia sampai dengan saat ini masih didominasi pekerjaan-pekerjaan pada sektor domestik yang dikenal sebagai sektor rentan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang mumpuni sebagai sarana perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Indonesia telah membentuk peraturan terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara itu jauh sebelum terbentuknya UU ini telah tercapai sebuah kesepakatan internasional terkait perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarga melalui International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families yang digagas pada tanggal 18 Desember 1990 di New York Amerika Serikat. Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap kesesuaiannya dalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Konvensi tersebut telah mampu mewarnai norma hukum dalam UU No. 18 Tahun 20017 dengan adanya penguatan-penguatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan melalui asas-asas dan keberadaan hak PMI yang tidak hanya mengatur individu PMI semata namun juga terkait dengan hak keluarga PMI.

**Kata Kunci : Pekerja Migran, Pekerja Migran Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, Konvensi**

## ABSTRACTION

Name : MUHAMMAD IQBAL  
NIM : 201510380211015  
Email : iqbal.maruapey@gmail.com  
Title : ***THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES IN LAW NUMBER 18 OF 2017 IN EFFORTS TO PROTECT INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN OVERSEAS***

Advisor : 1. Mokh. Najih, Ph.D.  
2. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.H.

## ABSTRACT

*The imbalance between the number of labor force and the number of jobs makes employment opportunities abroad one of solution to reduce unemployment. The migration process of the Indonesian people had begun long ago before the formation of the Republic of Indonesia. Sectors that were opened overseas with high acceptance of Indonesian citizens are still dominated by jobs in the domestic sector, known as the vulnerable sector. Therefore, qualified regulations are needed as a means of protection for Indonesian citizens abroad. Indonesia has established regulations relating to the placement of Indonesian Migrant Workers through Law Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers. Meanwhile, long before the formation of this law, an international agreement was made regarding the protection of migrant workers and their families through the International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families which was initiated on 18 December 1990 in New York, United States. In this research, an assessment of Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers against compliance with the principles contained in the International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families was carried out. From the research, it is found that the Convention has been able to influence the legal norms in Law no. 18 of 2017 with the strengthening of human values through the principles and the existence of Indonesian Migrant Workers rights which do not only regulate Indonesian Migrant Workers themselves but also related to their family rights.*

***Keywords: Migrant Workers, Indonesian Migrant Workers, Law Number 18 of 2017, Convention***

## I. PENDAHULUAN

Bekerja adalah merupakan hak mendasar bagi manusia. Negara Indonesia telah mengakuinya dan mengukuhkannya melalui Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 sebagai berikut:

*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Dari frasa pasal tersebut maka terdapat dua hal mendasar bagi warga negara yaitu:

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan;
2. Bekerja sesuai dengan standar kelayakan bagi kemanusiaan

Dua hal ini menjadi tanggungjawab negara untuk mewujudkannya. Demikian pula tentang hak masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Semakin luasnya jangkauan individu serta pergaulan antar manusia, semakin membuat batas-batas formal menjadi abstrak maka negara perlu terlibat dalam upaya perlindungan bagi warga negara terlebih dengan situasi saat ini kondisi ekonomi yang kurang bagus serta kurangnya pertumbuhan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja maka bekerja di luar negeri menjadi relevan untuk dijadikan pilihan.

Menurut data BPS tahun 2020 diketahui bahwa jumlah angkatan kerja per-Februari 2020 adalah 137,91 juta orang atau mengalami kenaikan sebanyak 1,73 juta orang dibandingkan pada bulan yang sama di tahun sebelumnya atau Februari 2019. Sementara itu pengangguran juga bertambah pada satu tahun terakhir sebanyak 60 ribu orang<sup>1</sup>. Fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan akseptansi pasar kerja di dalam negeri.

Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan pada tahun 2019 penempatan PMI didominasi angkatan kerja lulusan SMP (110.440 orang) dan SD (88.881 orang)<sup>2</sup>, pada bulan Januari sampai dengan April tahun

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, 2020, *Berita Resmi Statistik 5 Mei 2020*, dilihat pada 1 Agustus 2020, [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf)

<sup>2</sup> Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2019, *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019*, dilihat pada 1 Agustus 2020, [http://ebook.bnp2tki.go.id/Ebook\\_2019/#p=1](http://ebook.bnp2tki.go.id/Ebook_2019/#p=1)

2020 penempatan PMI masih didominasi kalangan latar belakang SD sebanyak 1.784 orang dan SMP yaitu 1.784 orang<sup>3</sup>.

Data BPS tahun 2020 menunjukkan angkatan kerja pada tahun 2020 sebanyak 137,91 juta orang yang terdiri dari penduduk yang telah bekerja maupun tidak bekerja atau pengangguran<sup>4</sup>. Dari angkatan kerja sebanyak 137,91 juta orang tersebut ternyata tingkat pengangguran tertinggi dialami oleh lulusan SMK yang tercatat menempati posisi pertama dalam kategori Tingkat Pengangguran terbuka diantara tingkat pendidikan lainnya yaitu 8,49 persen<sup>5</sup>.

Migrasi orang Indonesia sudah dimulai sejak lama bahkan sebelum terbentuknya Republik Indonesia yaitu pada masa era tanam paksa atau *cultuur stelsel* dimana banyak perpindahan secara paksa yang dilakukan oleh kongsi-kongsi perdagangan Belanda terhadap bumiputera untuk dipekerjakan pada area-area perkebunan milik Kerajaan Belanda di wilayah koloninya termasuk diantaranya adalah Suriname. Adanya politik penghapusan perbudakan pada tahun 1863 membuat para pekerja yang sebelumnya adalah dari Afrika kemudian membebaskan dirinya sehingga muncul kebutuhan untuk menggantikan para pekerja Afrika tersebut, maka dilakukan mobilisasi kepada bumiputera yang terdiri dari suku Jawa, Sunda, Madura dan Batak untuk mengisi pekerjaan tersebut di Suriname<sup>6</sup>.

Prediksi bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang akan mengalami kondisi bonus demografi adalah sesuatu yang juga tidak bisa diremehkan. Bonus demografi dimaknai sebagai bertambahnya jumlah penduduk pada usia kerja yang dipandang sebagai sebuah keuntungan walaupun jumlah penduduk total

---

<sup>3</sup> Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2020, *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode April 2020*, dilihat pada 1 Agustus 2020, [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_26-05-2020\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_APRIL\\_fix.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_26-05-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_APRIL_fix.pdf)

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, 2020, *Februari 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,99 persen*, dilihat pada 14 September 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html>

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *op. cit.*, hlm. 46

<sup>6</sup> Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Sejarah Pekerja Migran Indonesia*, dilihat pada 1 Agustus 2020, <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

mengalami peningkatan (Chandrasekhar, Ghosh, Roychowdhury:2006)<sup>7</sup>. Indonesia diprediksi akan mengalami lonjakan usia produktif dengan rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun mencapai persentase 70 persen dari total jumlah penduduk. Kondisi ini disatu sisi memiliki potensi bagi pembangunan bangsa namun disisi lain merupakan ancaman ketika kondisi ini tidak dieksploitasi dengan benar dan dipersiapkan. Bonus demografi akan menjadi permasalahan ketika bertumbuhnya usia produktif tidak di barengi dengan bertumbuhnya sektor lapangan pekerjaan. Selain bonus demografi pada negara-negara tertentu di dunia termasuk Indonesia, China dan Korea ada pula negara-negara yang mengalami penurunan demografi. Penurunan demografi yaitu kondisi dimana kelahiran lebih sedikit ketimbang kematian atau penduduk usia 65 tahun lebih banyak ketimbang usia produktif maka peluang-peluang kerja pada negara tersebut akan terbuka untuk diisi oleh tenaga kerja asing termasuk Pekerja Migran Indonesia.

Adanya kebutuhan lapangan pekerjaan, budaya migrasi orang Indonesia yang sudah berjalan dalam waktu yang lama dan juga sebagai saluran atas kemungkinan terjadinya lonjakan usia produktif di dalam negeri maka bekerja diluar negeri dapat menjadi solusi alternatif bagi warga negara oleh karenanya dibutuhkan regulasi yang mumpuni sebagai sarana perlindungan bagi WNI di luar negeri. Sektor-sektor pekerjaan yang dibuka diluar negeri dengan akseptansi tinggi pada WNI sampai dengan saat ini masih didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan pada sektor *domestic worker* selain sebagian kecil pada sektor *skilled worker*. Pekerja sektor domestik ini dikenal juga sebagai sektor rentan karena berada pada area kerja yang diistilahkan dengan 3D (*Dark, Dirty, Dangerous*) atau gelap, kotor dan berbahaya. Oleh karenanya kebutuhan proteksi yang efektif sangat diperlukan agar perlindungan terhadap WNI diluar negeri dapat terlaksana dengan baik.

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, *ANALISIS STATISTIK SOSIAL: Bonus Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi*, dilihat pada 15 September 2020, <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NGMzNmFmYWM4NDdjNjU2ZDRkYjkzMDQw&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTIvMTEvMzAvNGMzNmFmYWM4NDdjNjU2ZDRkYjkzMDQwL2FuYWxpc2lzLXN0YXRpc3Rpay1zb3NpYWwtLWJvbnVzLWRLbW9ncmFmaS1kYW4tcGVydHVtYnVoYW4tZWtvbm9taS0uaHRtbA%3D%3D&twoadfnearfeuf=MjAyMC0wOS0xNCAxNzo1NzoxNQ%3D%3D>



Indonesia telah menerbitkan peraturan terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia (dulu disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia) melalui Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, disisi lain jauh sebelum terbentuknya UU ini sudah terlebih dahulu terbit Kaidah internasional untuk perlindungan pekerja migran yaitu *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (selanjutnya disebut “Konvensi”) yang digagas pada tanggal 18 Desember 1990 di New York Amerika Serikat. Oleh karena itu jurnal ini bertujuan untuk melihat apa saja prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi serta sejauh mana prinsip-prinsip konvensi internasional tersebut diterapkan didalam regulasi UU No. 18 Tahun 2017 demi mewujudkan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Dengan alasan itu maka jurnal ini mengambil judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP - PRINSIP DALAM INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES PADA UU NO. 18 TAHUN 2017 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PMI DILUAR NEGERI”**.

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan elaborasi pada hal-hal diatas maka penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja prinsip-prinsip yang terkandung didalam *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* ?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 ?



### III. TINJAUAN PUSTAKA

- *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* yaitu sebuah konvensi internasional yang diinisiasi dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 18 Desember 1990 dengan menghasilkan Resolusi No. A/RES/45/158 perihal *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* atau dalam bahasa Indonesia yaitu Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).
- Undang-undang No. 18 Tahun 2017 adalah undang-undang yang dibentuk sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 sebagai dorongan kebutuhan adanya perkembangan kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan di luar negeri yang menyangkut dengan warga negara Indonesia.
- Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah peristilahan yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2017 untuk menyebut warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan menerima upah untuk waktu tertentu.
- Kata perlindungan dan pelindungan berasal dari kata dasar yang sama, yaitu lindung. Namun, imbuhan dan proses penurunannya berbeda. Kata perlindungan diturunkan dari lindung berlingung perlindungan, sedangkan pelindungan diturunkan dari lindung melindungi pelindungan. Berdasarkan proses pengimbuhan, dapat diketahui bahwa makna kata perlindungan berhubungan dengan kata kerja berlingung, sedangkan kata pelindungan berhubungan dengan kata melindungi<sup>8</sup>.
- Teori Hukum dan Pembangunan yaitu teori oleh Mochtar Kusumaatmadja yang dikenal juga sebagai Madzhab Unpad. Mochtar Kusumaatmdja menyampaikan bahwa untuk memelihara ketertiban terhadap peri kehidupan warga negara salah satu solusinya adalah dengan menggunakan hukum sebagai

---

<sup>8</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015, *Perbedaan Makna Perlindungan dan Pelindungan*, dilihat pada 1 Agustus 2020, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/apa-perbedaan-makna-perlindungan-dan-pelindungan>

alat. Walaupun hukum sifatnya konservatif secara fungsi namun ia juga harus memiliki kemampuan untuk mengimbangi perubahan yang sangat cepat didalam masyarakat<sup>9</sup>. Konservatisme hukum ini dimaknai bahwa sifat hukum yang memelihara dan mempertahankan capaian yang ada tentu diperlukan, namun demikian hal tersebut tidak cukup terlebih pada kondisi perubahan yang cepat seperti halnya pembangunan sebuah bangsa, hukum juga harus mampu adaptif dan tidak statis. Terdapat dua hal yang menjadi bagian penting dari teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja ini, yaitu :

1. Dalam proses pembangunan, ketertiban diperlukan bahkan mutlak keberadaannya
  2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi laksana alat pengatur atau sebagai sarana terlaksananya pembangunan sesuai idealita yang diinginkan menuju pembaharuan.
- Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
  - Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:
    1. Struktur Hukum/Pranata Hukum (*structure of law*) yaitu berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum)<sup>10</sup>.
    2. Substansi Hukum (*substance of the law*) yaitu berkaitan dengan aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem hukum dan penekanannya adalah pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co, hlm. 5.

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *Ibid*.

3. Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu berkaitan dengan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

- Studi Penelitian terdahulu

Studi Penelitian terdahulu adalah upaya untuk memeriksa apakah pernah ada penelitian yang sejenis dan apakah ada pengulangan dari tema dan judul yang sama untuk menemukan fakta orisinalitas dari karya ilmiah yang disajikan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

a. Bambang Widiyahseno, Rudianto, Diah Widaningrum

Bambang Widiyahseno, Rudianto, Diah Widaningrum melakukan penelitian dengan judul Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017.

Pada penelitian tersebut Bambang Widiyahseno, Rudianto, Diah Widaningrum memaparkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada UU No. 18 Tahun 2017. Persamaannya adalah pada materi UU No. 18 Tahun 2017 yang dipakai sebagai core penelitian. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih banyak pada aspek pemberdayaan dan kewirausahaan serta aspek sosiologisnya lebih kuat, sementara penelitian peneliti lebih pada prinsip-prinsip dalam konvensi dan penerapannya pada UU No. 18 Tahun 2017.

b. Makkiyyah, Rachmad Syafaat, Ummu Hilmy

Pada penelitian Makkiyyah, Rachmad Syafaat, Ummu Hilmy mengambil judul tentang Kesesuaian Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anggota Keluarga

Pekerja Migran. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah aspek tentang Konvensi Internasional yang mana juga peneliti bahas, namun perbedaannya adalah pada penelitian peneliti memiliki aspek kebaharuan yaitu didasarkan pada regulasi terbaru UU No. 18 tahun 2017.

#### IV. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam analisa maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif (*doctriner*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran atas dasar logika keilmuan hukum secara normatif. Hukum sebagai ilmu normatif memiliki caranya sendiri atau *sui generis* (Lambertus Johannes Apeldoorn : 1985)<sup>12</sup>. Ilmu hukum dipahami sebagai kumpulan kaidah (norma) oleh karena itu ilmu hukum disebut pula sebagai ilmu tentang sistem kaidah. Dalam penelitian ini kaidah atau norma disebut sebagai prinsip. Karl Larenz menyebut ilmu tentang kaidah sebagai *normwissenschaft*<sup>13</sup> yaitu hukum merupakan kaidah yang sifatnya memaksa, setiap pelanggaran pada kaidah-kaidah tersebut maka diancam dengan sanksi tegas.

Karena sifatnya yang *doctriner* maka penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) baik secara fisik dengan mengunjungi toko buku dan perpustakaan maupun penelusuran secara media daring. Penelitian ini akan berfokus pada peraturan-peraturan tertulis untuk menemukan data-data sekunder.

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim Dr. SH. Mhum., 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang, hlm. 50

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim Dr. SH. Mhum., *Ibid.* hlm. 51

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>14</sup>.

## **2. Pendekatan Masalah**

Sebagaimana jenis penelitian yang telah dipilih yaitu yuridis normatif, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti penerapan aturan dan asas-asas hukum dalam UU No. 18 Tahun 2017 yang berkenaan dengan prinsip yang terdapat dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

Pendekatan konsep dilakukan sebagai cara untuk memahami konsep-konsep perlindungan bagi pekerja migran didalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* dan penormaanannya dalam UU No. 18 Tahun 2017 sehingga diketahui keaktualannya dalam pembentukan hukumnya.

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk mengetahui apa saja yang terdapat didalam konvensi dan didalam regulasi serta yang tidak, sehingga diharapkan dapat diketahui aspek prinsip mana merupakan kesesuaian dan mana yang belum.

## **3. Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum Primer yang terdiri dari peraturan hukum terkait sesuai dengan hierarkinya yaitu sejak UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan atau aturan lain dibawah undang-undang serta bahan

---

<sup>14</sup> Mahmudji., Sri dan Soejono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

hukum internasional yaitu *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari buku, tesis, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap sebagai pemberi petunjuk ataupun penjelasan atas makna-makna terhadap bahan hukum primer maupun sekunder dalam hal ini kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### **4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian akan diformulasikan dalam narasi-narasi deskriptif dan preskriptif. Analisa deskriptif yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian yang dilakukan sedangkan analisa preskriptif yaitu menyampaikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

### **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES*.**

Cita Konvensi ini berawal dari keperihatinan dan kepedulian terhadap banyaknya buruh asal afrika yang dipindahkan secara ilegal ke wilayah eropa dari negara asalnya dan dipekerjakan dalam sistem perbudakan serta kerja paksa. PBB merasa bahwa peristiwa tersebut telah mencederai piagam PBB mengenai HAM yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dijadikan budak dan melarang segala bentuk perbudakan. Kejadian ini menjadi titik pangkal munculnya rekomendasi penyusunan konvensi PBB yang mengatur mengenai hak-hak pekerja migran serta untuk memerangi rasisme dan diskriminasi.



Pengertian Pekerja Migran di konvensi dimaknai sebagai seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan aktivitas yang dibayar disuatu negara dimana ia bukan merupakan warga negara.

Konvensi pula telah menjabarkan tipologi pekerja migran yang termasuk dalam pengaturannya, yaitu:

- a. Pekerja perbatasan yaitu pekerja migran yang bertempat di negara tetangga yang secara rutin terbiasa pulang dan pergi setiap hari atau setidaknya sekali dalam seminggu;
- b. Pekerja musiman yaitu pekerja migran yang sifat pekerjaannya bergantung pada kondisi musiman dan dilakukan hanya dalam sebagian waktu setiap tahunnya;
- c. Pelaut termasuk juga nelayan yaitu pekerja migran yang dipekerjakan pada kapal yang terdaftar di negara tertentu yang mana ia bukanlah merupakan warga negara dari negara tersebut;
- d. Pekerja di instalasi lepas pantai yaitu pekerja migran yang dipekerjakan di instalasi lepas pantai di bawah yurisdiksi suatu negara dimana ia bukanlah merupakan warga negara tersebut;
- e. Pekerja keliling yaitu pekerja migran yang harus bepergian ke negara atau negara-negara lain untuk waktu singkat sehubungan dengan kebutuhan pekerjaannya, sementara ia sendiri berdomisili sehari-hari di negara tertentu;
- f. Pekerja yang terikat proyek yaitu pekerja migran yang bekerja dalam jangka waktu tertentu untuk mengerjakan proyek tertentu sesuai permintaan majikannya;
- g. Pekerja dengan pekerjaan tertentu yaitu pekerja migran yang :
  - (1) Ditempatkan oleh majikannya untuk jangka waktu dan pada suatu negara, untuk melakukan pekerjaan tertentu;
  - (2) Untuk jangka waktu tertentu melakukan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian profesional, komersial, teknis, atau keahlian sangat khusus lain; atau

(3) Seseorang yang atas permintaan majikannya, melakukan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu ditempat yang sifatnya sementara atau persinggahan, baik saat berakhirnya izin tinggal ataupun sebelumnya maupun apabila ia tidak lagi melakukan tugas atau kewajiban tertentu yang diperintahkan kepadanya.

h. Pekerja Mandiri yaitu pekerja migran melakukan pekerjaan secara mandiri maupun bersama dengan keluarganya selain dari kontrak kerja, serta pekerja migran yang diakui sebagai wiraswasta menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara penempatan atau menurut sesuai dengan perjanjian bilateral atau multilateral.

Perihal hak keluarga pekerja migran disampaikan dengan jelas dalam konvensi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pekerja migran itu sendiri. Hal ini tampak pada setiap pengaturannya yang selalu mengikutkan keluarga dari pekerja migran dalam esensi prinsip perlindungan didalamnya. definisi keluarga pekerja migran sebagaimana disebutkan dalam article 4 konvensi ini adalah:

*“For the purposes of the present Convention the term “members of the family” refers to persons married to migrant workers or having with them a relationship that, according to applicable law, produces effects equivalent to marriage, as well as their dependent children and other dependent persons who are recognized as members of the family by applicable legislation or applicable bilateral or multilateral agreements between the States concerned.”*

Artinya bahwa makna anggota keluarga pekerja migran disini tidak terbatas pada hubungan keluarga yang terjadi sebagai akibat dari ikatan perkawinan yang sah secara hukum negara atau agama saja namun juga termasuk pada sebuah hubungan-hubungan yang serupa dengan perkawinan dimana timbulnya hak dan kewajiban dalam hubungan tersebut. Termasuk yang dimaksud dengan keluarga tidak terbatas pada ikatan darah namun juga anak-anak ataupun orang lain yang menjadi tanggungan pekerja migran yang diakui sesuai hukum yang berlaku, termasuk didalamnya adopsi, pengangkatan keluarga dan lain sebagainya.

Dalam pengamatan peneliti bahwa prinsip-prinsip didalam isi konvensi masih dapat dikelompokkan lagi menjadi empat bagian sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini :

### 1. Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarga

Pada bagian ini diatur prinsip-prinsip hak asasi pekerja migran secara keseluruhan tanpa melakukan dikotomisasi apakah pekerja migran tersebut berproses dan berangkat secara resmi ataupun tidak resmi ataupun terdaftar ataupun tidak terdaftar. Bagian III konvensi ini terdiri dari 28 pasal didalamnya. Lebih jauh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1** Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarga di dalam Konvensi

NO.	HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN KELUARGA DI DALAM KOVENSI
1	Kebebasan untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara asalnya serta berhak untuk kembali ke lagi negara asal (Pasal 8)
2	Perlindungan hukum atas Hak hidup pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 9)
3	Larangan terhadap tindakan penyiksaan, kejam, tidak manusiawi dan merendahkan pekerja migran dan keluarganya (Pasal 10 dan 11)
4	Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani serta memilih dan mempraktikan keagamaanya serta bergabung dalam komunitas agama (Pasal 12)
5	Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk mengeluarkan pendapat dan berekpresi termasuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide dalam bentuk apapun tanpa interfensi (Pasal 13)
6	Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas privasi, korespondensi ataupun berkomunikasi dalam bentuk apapun dan harus dilindungi oleh hukum atas tindakan kesewenangwenangan (Pasal 14)
7	Pekerja migran dan keluarganya berhak atas properti baik yang dimiliki pribadi maupun bersama pihak lain dan dalam hal negara mengambil alih properti tersebut maka harus memberikan ganti rugi yang adil (Pasal 15)

8	Pekerja migran berhak atas kebebasan, keamanan pribadi, perlindungan efektif dari negara terhadap ancaman, kekerasan fisik maupun intimidasi dari pejabat publik maupun pihak swasta dan tidak diperlakukan sewenang-wenang di depan hukum serta akses hukum dan keadilan (Pasal 16)
9	Pekerja migran yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan apabila ditahan harus dipisahkan dari narapidana kasus lainnya, bilamana anak maka harus diproses adjudikasi (Pasal 17)
10	Pekerja migran dan keluarganya berhak atas kesetaraan di depan hukum atau prinsip equality before the law serta berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka dan didampingi penasihat hukum (Pasal 18)
11	Pekerja migran dan keluarganya tidak boleh dinyatakan bersalah atas tindak pidana apapun apabila belum ada ketentuan nasional yang mengatur pada saat tindakan tersebut terjadi (Pasal 19)
12	Pekerja migran atau anggota keluarganya tidak boleh dipenjara atau dicabut izin kerjanya hanya atas dasar kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontrak (Pasal 20)
13	larangan bagi siapapun yang melakukan penyitaan atau menghancurkan dokumen dan paspor pekerja migran beserta anggota keluarganya kecuali dilakukan oleh pejabat publik yang berwenang (Pasal 21)
14	Pekerja migran dan keluarganya tidak boleh menjadi sasaran pengusiran secara kolektif kecuali dilakukan dengan keputusan oleh otoritas yang berwenang serta telah dikomunikasikan dengan bahasa yang mereka pahami (Pasal 22)
15	Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dari otoritas konsuler atau diplomatik dari Negara asalnya atau negara yang mewakili kepentingan negara asalnya (Pasal 23)
16	Setiap pekerja migran dan setiap anggota keluarganya berhak atas pengakuan di depan hukum (Pasal 24)
17	Pekerja migran berhak perlakuan yang sama dengan warga negara sehubungan remunerasi, kondisi kerja dan syarat kerja yang layak yang meliputi jam kerja, uang lembur, istirahat mingguan, liburan dengan tetap digaji, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan saat PHK, usia minimum, pembatasan pekerjaan rumahan serta syarat kerja lainnya sesuai dengan praktik hukum nasional (Pasal 25)

18	Pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul serta meminta bantuan kepada serikat atau perkumpulan pekerja (Pasal 26)
19	Perlakukan yang sama dalam hal jaminan sosial antara pekerja migran dan warga negara (Pasal 27)
20	Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas perawatan medis yang setara perlakukannya dengan warga negara di negara tujuan (Pasal 28).
21	Setiap anak seorang pekerja migran berhak atas nama, pendaftaran kelahiran dan kewarganegaraan (Pasal 29).
22	Setiap keturunan dari pekerja migran memiliki hak dasar atas akses pendidikan (Pasal 30)
23	Kewajiban kepada negara untuk menghormati identitas budaya pekerja migran dan keluarganya (Pasal 31)
24	Setelah berakhirnya masa tinggal di tempat kerja maka para pekerja migran berhak untuk memindahkan pendapatan dan tabungan serta barang-barang pribadi mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan (Pasal 32)
25	Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas informasi atas hak-hak mereka berdasarkan konvensi (Pasal 33)
26	Kewajiban pekerja migran dan keluarganya untuk menaati aturan di negara tujuan dan negara transit serta menghormati budaya asal negara tersebut (Pasal 34)
27	Kewajiban untuk memperlakukan secara setara baik pekerja migran resmi maupun tidak resmi (Pasal 35)

Sumber : Data Primer dari Resolusi No. A/RES/45/158 Konvensi 1990

Dari poin-poin didalam tabel diatas tampak bahwa pekerja migran beserta keluarganya dengan apapun bentuk proses bekerja yang dilaluinya apakah prosedural ataupun tidak, berhak atas perlindungan hukum negara dimanapun keberadaannya.

Status hukum pekerja migran tidak menjadi alasan pembenar untuk mengabaikan perlindungan pekerja migran dimanapun berada, selain itu sebagai manusia merdeka pekerja migran juga memiliki hak berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya ataupun dari dalam maupun keluar dari sebuah negara, hak ini sifatnya mutlak yang harus dihormati oleh negara manapun dan juga memiliki hak untuk menetap pada negara

tertentu sesuai dengan aturan hukum setempat. Selain itu juga diatur prinsip anti perbudakan yaitu pekerja migran memiliki kedudukan yang setara dengan siapapun pada tempat manapun serta memiliki hak untuk berkomunikasi dan menguasai barang-barang pribadinya sehingga perbuatan-perbuatan yang sifatnya perampasan ataupun pemaksaan kepada pekerja migran dan keluarganya adalah perbuatan yang melanggar HAM.

## 2. Hak-hak Bagi Pekerja Migran dan Keluarga yang Berdokumen

Hak pekerja migran dan keluarganya yang berdokumen ada pada Bagian ke IV Konvensi yang terdiri dari 20 Pasal yaitu Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Bagian IV ini mengatur aturan tambahan yang berkaitan dengan pekerja migran yang resmi (regular), yaitu pekerja migran yang proses keberangkatannya telah terdata dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan, lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dibawah :

**Tabel 5.2 Hak Pekerja Migran Berdokumen dan Keluarga di dalam Konvensi**

NO.	HAK PEKERJA MIGRAN BERDOKUMEN DAN KELUARGA DI DALAM KOVENSI
1	Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak diinformasikan oleh negara asal dan tujuan sebelum keberangkatan atau selambat-lambatnya saat diterima di negara tujuan tentang ketentuan dan kondisi yang berlaku untuk penerimaan mereka, terutama yang berkaitan dengan masa tinggal, kegiatan pembayaran yang mungkin dialami, syarat-syarat untuk bekerja dan otoritas yang bisa dihubungi sewaktu terjadi perubahan-perubahan kondisi ( Pasal 37)
2	Berhak diberi tahu tentang persyaratan cuti sementara yang diijinkan (Pasal 38)
3	Bebas bergerak dan memilih tempat tinggal di negara tujuan (Pasal 39)
4	Membentuk perkumpulan dan serikat pekerja (Pasal 40)
5	Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak berpartisipasi dalam urusan publik di negara asal serta berhak memilih dan dipilih dalam pemilu sesuai dengan ketentuan hukum negara asalnya dan pemerintah wajib memfasilitasinya (Pasal 41)



6	Negara tujuan wajib memfasilitasi partisipasi pekerja migran dan anggota keluarganya dalam pengambilan keputusan tentang kehidupan dan administrasi masyarakat lokal dan pekerja migran dapat menikmati hak politik di negara tempat bekerja sepanjang negara tersebut memberi hak sesuai prinsip kedaulatannya (Pasal 42)
7	Menikmati kesetaraan perlakuan dengan warga negara tujuan dalam hal akses pendidikan, bimbingan kejuruan, perumahan, pelayanan sosial, perusahaan-perusahaan koperasi dan swaloka, akses dan partisipasi pada kehidupan budaya (Pasal 43)
8	Apabila terkena PHK maka masih memiliki hak untuk mencari pekerjaan alternatif selama waktu yang tersisa dari ijin kerja mereka (Pasal 51)
9	Berhak memilih aktivitas yang dibayar berdasarkan ketentuan negara tujuan (Pasal 52)
10	Menikmati kesetaraan dalam perlindungan terhadap pemecatan, tunjangan pengangguran dan pekerjaan alternatif (Pasal 54)
11	Pekerja migran yang telah berizin untuk melakukan kegiatan berbayar berhak atas perlakuan yang setara sebagaimana warga negara di tempat kerjanya (Pasal 55)
12	Pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh dikeluarkan dari negara tempat bekerja kecuali telah ditetapkan dalam undang-undang nasional serta harus mempertimbangkan faktor kemanusiaan (Pasal 56)

Sumber : Data Primer dari Resolusi No. A/RES/45/158 Konvensi 1990

Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan negara mengenai hal teknis seseorang menjadi pekerja migran, mekanisme penyampaian informasi serta persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan bagi warga negara untuk bekerja diluar negeri. Negara juga bekerjasama dengan negara-negara lainnya untuk memastikan penegakan kesetaraan serta hak-hak minimal dalam bekerja sebagaimana prinsip konvensi yang tidak membedakan dengan penduduk asli pada negara penempatan tersebut selain juga untuk mempersiapkan infrastruktur untuk pemenuhan hak politik pekerja migran dimanapun berada.

### 3. Kewajiban Pekerja Migran beserta Keluarganya

Mengenai kewajiban diatur pada pasal 34 Konvensi yaitu bahwa Konvensi tidak melepaskan pekerja migran dan keluarganya dari kewajiban untuk

taat kepada hukum baik hukum negara transit maupun negara tujuan termasuk kewajiban untuk menghormati adat istiadat dan kebiasaan para penduduk di negara-negara itu.

#### 4. Kewajiban Negara Asal maupun Tujuan Pekerja Migran dan Keluarga

Kewajiban negara di dalam konvensi dibedakan menjadi kewajiban yang merupakan tanggungjawab negara asal pekerja migran dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab seluruh negara yang menjadi pihak terkait baik negara transit maupun negara tujuan pekerja migran dan keluarga, sebagai berikut:

##### a. Kewajiban Negara Asal Pekerja Migran Dan Keluarganya

Negara asal pekerja migran bertanggungjawab terhadap penyusunan alur dan prosedur bermigrasi serta kewajiban bekerjasama dengan negara-negara yang menjadi tujuan pekerja migran untuk membentuk sistem terkait dengan pemenuhan hak politik, pemenuhan fasilitas pendidikan bagi pekerja migran dan keluarga, pusat pelayanan pengaduan dan pendampingan bagi pekerja migran yang bermasalah di luar negeri, Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.3** Kewajiban Negara Asal Pekerja Migran di dalam Konvensi

NO.	KEWAJIBAN NEGARA ASAL PEKERJA MIGRAN DI DALAM KOVENSI
1	Menginformasikan mengenai tata cara bermigrasi, ketentuan yang berlaku di negara tujuan kerja, jenis kerja yang boleh dilakukan, masa tinggal, persyaratan dan pejabat yang harus dihubungi bila ada perubahan (Pasal 37)
2	Negara tujuan wajib memfasilitasi partisipasi pekerja migran dan anggota keluarganya dalam pengambilan keputusan tentang kehidupan dan administrasi masyarakat lokal dan pekerja migran dapat menikmati hak politik di negara tempat bekerja sepanjang negara tersebut memberi hak sesuai prinsip kedaulatannya (Pasal 42)
3	Bekerjasama dengan negara tujuan mengupayakan suatu kebijakan penyediaan fasilitas integrasi anak-

	anak pekerja migran pada sistem sekolah setempat dengan pengajaran bahasa lokal dan pengajaran bahasa ibu serta budaya asal bekerjasama dengan negara asal (Pasal 45)
4	Memajukan kondisi yang baik, setara dan manusiawi dalam hal kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya bagi pekerja migran dan anggota keluarganya termasuk akibat-akibat migrasi pada komunitas bersangkutan (Pasal 64)
5	Penyediaan informasi kepada pekerja migran mengenai hukum dan peraturan di negara tujuan, tata cara, pengaturan keberangkatan, perjalanan, kedatangan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, cara hidup di negara tujuan, nilai tukar mata uang, pajak, kepabeanan dan hukum dan peraturan lain yang relevan (Pasal 65)
6	Penyediaan layanan konsuler (Pasal 65)
7	Memajukan kondisi ekonomi dan memfasilitasi reintegrasi sosial dan budaya pasca bekerja (Pasal 67)
8	Pemulangan jenazah dan penyediaan bantuan bagi pekerja migran yang menghadapi masalah terkait hal tersebut (Pasal 71)
9	Berupaya menerapkan ketentuan dalam Konvensi ini dengan membuat kebijakan dan harmonisasi kebijakan (Pasal 84)

Sumber : Data Primer dari Resolusi No. A/RES/45/158 Konvensi 1990

Fungsi negara asal juga termasuk penyediaan informasi, pembinaan ketahanan ekonomi pekerja migran dan bertanggungjawab terhadap pekerja migran sampai dengan kepulangannya baik hidup ataupun meninggal dunia.

#### **b. Kewajiban Seluruh Negara Terkait Pekerja Migran Dan Keluarganya**

Negara transit adalah negara-negara yang menjadi jalur persinggahan ataupun perlintasan pekerja migran dalam perjalanan menuju negara tujuannya bekerja. Kewajiban setiap negara yang terlibat tersebut dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4** Kewajiban Seluruh Negara Para Pihak Terkait Pekerja Migran dan Keluarga di dalam Konvensi

NO.	<b>KEWAJIBAN SELURUH NEGARA PARA PIHAK TERKAIT PEKERJA MIGRAN DAN KELUARGA DI DALAM KOVENSI</b>
1	Mengakui hak para pekerja migran dan anggota keluarganya dalam hal berserikat berkumpul dan berorganisasi dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya (Pasal 26)
2	Menjamin penghormatan pada identitas budaya pekerja migran dan anggota keluarganya dan negara para pihak dapat mengambil langkah untuk membantu pelestarian budaya ini dengan negara asal pekerja migran (Pasal 31)
3	Mengambil kebijakan untuk menyebarluaskan informasi hak-hak dan kewajiban pekerja migran menurut hukum dan praktik di negara bersangkutan (Pasal 33)
4	Melakukan promosi terhadap kondisi dengan tujuan memastikan bahwa kesetaraan perlakuan dapat berjalan efektif sehingga memungkinkan bagi para pekerja migran untuk dapat menikmati hak-hak yang setara sebagaimana warga negara tujuan kerja dalam akses pendidikan dan pelatihan, perumahan, layanan sosial dan kesehatan, partisipasi kebudayaan dan akses koperasi dan perusahaan swakelola (Pasal 43)
5	Memastikan perlindungan terhadap kesatuan keluarga pekerja migran (Pasal 44)
6	Mengambil langkah-langkah yang dianggap tepat dan sesuai kewenangannya untuk fasilitasi reunifikasi pekerja migran dengan pasangan atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pekerja migran yang, berdasarkan hukum yang berlaku memiliki akibat sama halnya dengan perkawinan, serta dengan anak-anak di bawah umur dalam tanggungan mereka yang belum menikah (Pasal 44)
7	Menfasilitasi kebijakan transfer penghasilan pekerja migran untuk keluarganya (Pasal 47)
8	Menetapkan kebijakan untuk menghindarkan pekerja migran dari pajak berganda (Pasal 48)
9	Negara pihak terkait wajib berkolaborasi dan bekerjasama secara tepat dengan tujuan memajukan kondisi yang lebih baik, setara dan manusiawi sehubungan dengan migrasi internasional pekerja dan anggota keluarganya (Pasal 64)
10	Kerjasama antar negara untuk menyediakan pelayanan yang tepat mengenai migrasi internasional pekerja dan anggota keluarganya, meliputi perumusan dan penerapan kebijakan,

	pertukaran informasi, konsultasi mengenai kebijakan, hukum, peraturan dan perjanjian dan hal lain yang relevan (Pasal 65)
11	Penyediaan informasi mengenai tata cara migrasi yang aman dan bermartabat (Pasal 65)
12	Bekerja sama dalam hal pemulangan pekerja migran dan anggota keluarganya ke negara asal (Pasal 67)
13	Mengambil kebijakan yang memadai dan efektif untuk menghapuskan pekerja migran dalam situasi tidak berdokumen/tak-reguler termasuk jika diperlukan, menjatuhkan sanksi kepada orang yang mempekerjakan dan menghukum orang, kelompok atau entitas yang melakukan intimidasi kepada pekerja migran tidak berdokumen/tak-reguler (Pasal 68)
14	Memulangan jenazah para pekerja migran ke negara asal (Pasal 71)
15	Mengambil kebijakan yang tidak kurang menguntungkan yang dialami pekerja migran tidak berdokumen agar memenuhi standar kebugaran, keselamatan, kesehatan dan prinsip-prinsip martabat manusia (Pasal 70)
16	Memastikan setiap pekerja migran dan anggota keluarganya yang menjadi korban mendapatkan upaya pemulihan yang efektif, baik pelanggaran tersebut dilakukan oleh negara dan nonnegara (Pasal 83)
17	Membuat dan menyerahkan laporan kepada Sekjen PBB (Pasal 73)

Sumber : Data Primer dari Resolusi No. A/RES/45/158 Konvensi 1990

Negara yang terlibat dalam proses pekerja migran haruslah berkolaborasi dalam perlindungan pekerja migran. Negara-negara tersebut haruslah membentuk sistem migrasi internasional yang memenuhi prinsip-prinsip konvensi ini serta menghargai identitas budaya pekerja migran dari manapun asalnya. Negara juga harus terlibat dalam menjaga keutuhan keluarga pekerja migran serta wajib melakukan fungsi-fungsi pemberian informasi mengenai hak-hak pekerja migran dengan maksimal. Disamping itu juga negara-negara tersebut wajib bekerjasama ketika pekerja migran meninggal dunia, proses pemulangan serta memastikan segala aset pribadi pekerja migran dalam kembali secara utuh kepada negara asal.

## **B. IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KONVENSI DALAM UU NO. 18 TAHUN 2017.**

Konvensi dalam sistem hukum Indonesia diakui sebagai bagian dari hukum internasional. Hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang sebagian besarnya terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa terikat untuk menaati, dan karenanya , benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan antara satu dengan lainnya<sup>15</sup>. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ini meliputi<sup>16</sup>:

- a. Kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu: dan
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Bentuk hukum internasional sebagai sumber-sumber kaidah dan prinsip menurut JG Starke dibagi dalam lima kategori yaitu Kebiasaan, Traktat-traktat, Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase, Karya-karya hukum, Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional.<sup>17</sup>

Damos Dumoli Agusman memetakan bentuk perjanjian internasional berdasarkan praktik jamak yang dilakukan oleh Indonesia adalah Traktat (*Treaty*), Konvensi (*Convention*), Persetujuan (*Agreement*), Memorandum saling pengertian (*Memorandum of Understanding*), Pengaturan (*Arrangement*), Pertukaran nota diplomatik/surat (*Exchange of Note/Letters*), *Modus Vivendi*, *Agreed Minutes/Summary Records/Record of Discussion*<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> J.G. Starke, 2018, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 3

<sup>17</sup> JG Starker, *Op. Cit.*, hlm. 42

<sup>18</sup> Damos Dumoli Agusman, 2017, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 32



Damos Dumoli Agusman menyampaikan bahwa konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi dan bersifat multilateral<sup>19</sup>. Konvensi biasanya bersifat *law making treaty* dengan pengertian sebagai peletak kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip hukum bagi masyarakat internasional. Sementara itu J.G. Starke Memandang konvensi sebagai bagian dari bentuk traktat. JG Starke membaginya menjadi 2 bentuk<sup>20</sup> dalam konteks traktat ini yaitu:

- a. Traktat-traktat yang membuat hukum (*law making*) yang menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal dan umum;
- b. Traktat-traktat kontrak (*treaty contract*) misalnya suatu traktat antara dua atau hanya beberapa negara yang berkenaan dengan permasalahan khusus dan eksklusif menyangkut negara-negara tersebut.

Konvensi menurut J.G. Starke masuk dalam konteks traktat yang membuat hukum karena memuat kaidah-kaidah hukum internasional universal, yang walaupun sifatnya universal namun juga merupakan “*framework convention*” yang membebaskan kewajiban-kewajiban untuk menetapkan perundang-undangan atau menawarkan pilihan-pilihan dalam kaitan mana negara harus menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan didalam konvensi. Indonesia adalah salah satu negara yang telah melakukan ratifikasi atas konvensi perlindungan pekerja migran dan keluarga melalui UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* atau Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Ratifikasi dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2020 adalah termasuk bagian dari pengesahan sebagai pengikatan diri pada perjanjian internasional. Peneliti membandingkannya dalam tabel yang berikut:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 33

<sup>20</sup> J.G. Starke, *Op. cit.*, hlm. 52

**Tabel 5.5** Implementasi Prinsip-Prinsip Konvensi dalam UU No. 18 Tahun 2017

<b>IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KONVENSI DALAM UU NO. 18 TAHUN 2017</b>				
<b>NO.</b>	<b>BAGIAN</b>	<b>KONVENSI</b>	<b>UU NO. 18 TAHUN 2017</b>	<b>ANALISA</b>
1	Ruang Lingkup dan Definisi	Konvensi berlaku pada seluruh proses migrasi pekerja migran sejak persiapan, keberangkatan, transit, masa tinggal dan kembali ke negara asal.	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.	Terakomodir sepenuhnya dalam tahapan perlindungan yang sama yaitu sebelum, selama dan setelah
		Pekerja Migran mengacu pada seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan aktivitas yang dibayar di suatu Negara di mana ia bukan merupakan warga negara	Pekerja Migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.	Pengertian pekerja migran nampak sepenuhnya sesuai antara konvensi dan UU
		Jenis Pekerja Migran : pekerja lintas batas, pekerja musiman, pelaut dan nelayan, pekerja pada instalasi lintas pantai, pekerja keliling,	Jenis Pekerja Migran : PMI pada pemberi kerja berbadan hukum, PMI pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga,	Secara tulisan berbeda, pada konvensi menyebutkannya secara parsial, sementara pada UU No. 18 Tahun 2017

		pekerja proyek, pekerja dengan pekerjaan tertentu, pekerja mandiri	pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, PMI perseorangan (Psl. 1 ayat 4, Psl. 63).	membuat kategori berdasarkan parameter pemberi kerja berbadan hukum dan tidak, namun secara umum memiliki konteks yang sama pada segmentasi pekerja migrannya
		<p>Pengecualian Pekerja Migran :</p> <p>a. orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh organisasi dan badan-badan internasional, atau oleh suatu Negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;</p> <p>b. orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara atau atas nama Negara di luar wilayahnya untuk berpartisipasi dalam program pembangunan dan program kerja sama lain yang berdasarkan perjanjian dengan Negara tujuan kerja dianggap bukan sebagai pekerja migran;</p> <p>c. orang-orang yang bertempat tinggal di Negara yang berbeda dengan Negara asalnya sebagai penanam modal;</p>	<p>Tidak termasuk PMI yaitu :</p> <p>a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;</p> <p>b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;</p> <p>c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;</p> <p>d. penanam modal;</p> <p>e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;</p> <p>f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara;</p>	<p>Sebagian besar memiliki kesamaan kecuali pada bagian konvensi yang mengecualikan pelaut dan pekerja instalasi lepas pantai yang tidak berizin, sementara UU No. 18 Tahun 2017 tidak memasukkan hal tersebut didalam pengecualian.</p> <p>Dalam konteks kualitas perlindungan, UU No. 18 Tahun 2017 selangkah lebih maju karena tidak terlalu dikotomis dalam melaksanakan tugas-tugas wajib perlindungan kepada warga negara</p>

		<p>d. pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan;</p> <p>e. pelajar dan peserta pelatihan;</p> <p>f. pelaut dan pekerja pada suatu instalasi lepas pantai yang belum memperoleh izin tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja.</p>	<p>g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.</p>	
		<p>keluarga yaitu orang-orang yang kawin atau punya hubungan dengan pekerja migran yang menurut hukum yang berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anak dan orang lain yang dianggap sebagai keluarga serta menjadi tanggungan mereka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara-Negara yang bersangkutan</p>	<p>Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.</p>	<p>Keduanya memiliki padanan dalam konteks pemasukan keluarga dalam entitas perlindungan yang tidak terlepas dari PMI itu sendiri. Bagi UU No. 18/2017 ini adalah perubahan revolusioner dalam tata hukum perlindungan PMI dan sebagai penegasan bahwa Konvensi benar-benar diperhatikan dalam UU ini</p>
2	Non Diskriminasi Dalam Kaitan dengan Hak	<p>Negara-Negara Pihak berupaya untuk menghormati dan memastikan semua pekerja migran dan anggota keluarganya didalam wilayahnya atau yang tunduk pada yuridiksinya memperoleh hak-hak yang diatur dalam Konvensi ini tanpa pembedaan apa pun seperti</p>	<p>Asas perlindungan PMI antara lain persamaan hak, pengakuan atas martabat dan HAM, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi</p>	<p>Narasi pada negara untuk menghormati HAM pekerja migran tanpa kecuali pada bagian ini diimplementasikan oleh UU No. 18/2017, walau tidak persis sama dalam penulisan namun ruhnya tercermin pada konsideran</p>

		jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain sesuai instrumen HAM.		dan asas-asas yang tercantum dalam UU dengan disertai pengertiannya pada penjelasan yang secara utuh telah melingkupi maksud dari konvensi.
3	HAM Bagi Seluruh Pekerja Migran Beserta Keluarga	<p>Pasal 8 - 11 disebutkan tentang hak-hak terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bebas keluar dan kembali ke negara asal;</li> <li>• Hidup;</li> <li>• Larangan perlakuan, penghukuman dan penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat</li> <li>• Larangan perbudakan dan kerja paksa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menimbang c : bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;</li> <li>• Asas terkait dalam Pasal 2 huruf c dan h yaitu pengakuan atas martabat dan HAM, anti-perdagangan manusia</li> <li>• Pasal 6 ayat (1) huruf g : memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</li> </ul>	Ide dalam bagian ini diimplementasikan oleh UU No. 18/2017 secara penuh walau tidak persis sama dalam gramatikal dan terkesan tersebar, namun secara spirit telah terlingkupi dan tidak hanya itu juga memberikan kewajiban pada negara untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum atas perkara ini

			undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;	
		hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama atas pilihannya sendiri dan beribadah baik secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain baik di tempat umum atau pribadi.	Pasal 6 huruf e : hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;	Telah terakomodasi sepenuhnya walau tidak persis sama dalam penulisan
		hak untuk berpendapat, kebebasan berekspresi baik secara lisan, tulisan atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain pilihannya.	Pasal 2 huruf d : asas demokrasi	Asas demokrasi yaitu Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Dengan demikian maksud dari konvensi telah terakomodasi
		Hak atas urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, korespondensi, atau komunikasi lain	Pasal 6 ayat (1) huruf i : Hak memperoleh akses komunikasi	Telah terakomodir
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;</li> <li>• Hak atas perlindungan efektif dari negara;</li> <li>• Hak untuk berkonsultasi dan didampingi oleh konsuler maupun pejabat terkait.</li> </ul>	Pasal 21 ayat (1) Huruf d : fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; Huruf e : pemberian layanan jasa konsuleran; Huruf f : pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa	UU No. 18/2017 telah memfasilitasi cita konvensi dalam bagian perlindungan PMI pada tahapan selama bekerja dan memberikan tanggungjawab kepada negara dalam pelaksanaan fungsi tersebut

			advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;	
		<p>Pasal 17 – 24 meliputi hak-hak pekerja migran dalam situasi menghadapi masalah hukum di negara penempatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperlakukan manusiawi serta dihormati martabatnya;</li> <li>• Pemisahan Pekerja migran dibawah umur dengan dewasa dan diperlakukan sesuai umurnya;</li> <li>• Kesetaraan di depan hukum;</li> <li>• Asas praduga tak bersalah</li> <li>• Menerima informasi terkait kasus yang dihadapi sesuai dengan bahasa yang dimengerti pekerja migran;</li> <li>• Mengedepankan perbaikan dan rehabilitasi ketimbang penal;</li> <li>• Asas <i>nebis in idem</i>;</li> <li>• Asas legalitas;</li> <li>• Larangan penghukuman sebagai akibat kegagalan memenuhi suatu kewajiban perjanjian;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6 ayat (1) huruf j : hak menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;</li> <li>• Pasal 31 huruf a mensyaratkan bahwa negara tujuan harus memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi Tenaga Kerja Asing;</li> <li>• 32 ayat (1) huruf a dan huruf b menyebutkan bahwa pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan PMI pada negara tertentu dengan pertimbangan Keamanan dan perlindungan HAM</li> </ul>	<p>Pada bagian ini, konvensi lebih banyak menyampaikan tentang hal-hal proteksi teknis bagi pekerja migran ketika menghadapi proses hukum. Prinsip-prinsip peradilan universal disebutkan pula dalam konvensi.</p> <p>Dari narasi di dalam konvensi, maka dapat disimpulkan hal ini lebih banyak ditujukan kepada negara tempat pekerja migran bekerja.</p> <p>Dalam konteks ini UU No. 18/2017 tidak menjabarkannya secara detail karena sudah masuk dalam teknis ber-acara hukum, selain itu Indonesia adalah negara <i>sender</i> atau pengirim, bukan penerima.</p> <p>Namun demikian UU No. 18/2017 mencoba</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larangan pengusiran dan perampasan hak izin tinggal atau kerja;</li> <li>• Larang penyitaan identitas maupun dokumen perjalanan oleh orang yang tidak berwenang.</li> </ul>		memberikan batasan preventif agar tidak terjadi permasalahan hukum kedepannya yaitu dengan penguatan hak dan juga pembatasan kategori negara tertentu yang dapat ditempati PMI serta pemberian kewenangan pada negara untuk menghentikan atau melarang penempatan dengan alasan tertentu berkaitan dengan keselamatan PMI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak perlakuan sama dengan warga negara tujuan dalam hal penggajian dan hak kerja lainnya yaitu uang lembur, jam kerja layak, istirahat minggu, keselamatan, kesehatan, PHK</li> <li>• Kewajiban negara untuk berupaya memenuhi hak ketenagakerjaan pekerja migran ilegal (<i>irregular</i>) dan majikan wajib bertanggungjawab dalam pemenuhannya tanpa melihat status hukumnya.</li> </ul>	Pasal 6 ayat (1) huruf f : hak memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;	Terkait prinsip upah sudah dimasukkan dalam UU No. 18/2017 sebagai komponen hak, selain itu tersebar pula dalam pasal yang lain yaitu pada kewajiban negara untuk melakukan verifikasi dokumen dan terhadap pemberi kerja dan standar upah yang ditawarkan pada tahapan sebelum bekerja sebagai upaya kontrol preventif
		Hak mengikuti perkumpulan, bergabung dalam serikat pekerja,	Pasal 6 ayat (1) huruf k : hak berserikat dan berkumpul di	Peneliti meyakini ini adalah prinsip universal yang jamak

		penggalangan dana melalui perkumpulan	negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;	diikuti oleh negara demokratis. UU No. 18/2017 telah menampilkannya sebagai salah satu hak PMI yang mutlak sesuai prinsip HAM
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• kewajiban fasilitas jaminan sosial bagi pekerja migran dan keluarga sebagaimana diterima oleh warga negara tujuan</li> <li>• hak menerima perawatan kesehatan yang setara sebagaimana warga negara tujuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 29 mengamanatkan agar negara menyelenggarakan jaminan sosial bagi PMI dan dikelola oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>• Pasal 31 huruf c mensyaratkan penempatan PMI hanya diperkenankan pada negara yang telah memiliki sistem jaminan sosial atau asuransi yang melindungi pekerja asing</li> </ul> <p>*Jamsos PMI terdiri dari dua manfaat yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian</p>	<p>Walau tidak sama persis namun maksud konvensi lunas terbayar dalam UU No. 18/2017 melalui pengaturan kewajiban PMI untuk dilengkapi jaminan sosial sebagai syarat kerja dan juga persyaratan negara penempatan yang harus memiliki sistem jaminan sosial bagi pekerja asing.</p> <p>PMI prosedural akan memiliki dua manfaat dalam jaminan sosial yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selain itu jg perlindungan asuransi di negara tujuan meliputi askes dan astek</p>
4	Hak lain dari para pekerja migran dan anggota keluarganya	Hak atas informasi mengenai syarat-syarat penerimaan di negara tujuan, masa tinggal dan pekerjaan,	Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b yaitu mengenai tahapan perlindungan sebelum bekerja, ada	Terkait hak informasi pra keberangkatan ini diatur dalam UU No. 18.2017 pada

	yang dalam status terdokumentasi atau resmi	serta persyaratan yang harus dipenuhi di Negara tujuan kerja beserta no kontak pihak yang dapat dihubungi terkait itu pada saat sebelum keberangkatan	tahapan teknis yang mana didalamnya meliputi pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi kepada PMI dan juga peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan	tahapan perlindungan sebelum bekerja yang mana salah satu yang harus dilakukan adalah pemberian sosialisasi dan informasi kepada PMI serta pemberian pelatihan sebelum bekerja. Pada tahap ini informasi terkait negara tujuan, sektor pekerjaan, hak dan kewajiban di informasikan Pada tahapan pra keberangkatan PMI juga diwajibkan mengikuti orientasi pra pemberangkatan/OPP yang materinya adalah pengenalan negara tujuan, regulasi dan perjanjian kerja
		Kewajiban negara dalam fasilitasi kepulangan PMI baik reguler maupun irregular	Pasal 24 ayat (1) huruf a : fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;	Telah terakomodir
		Kewajiban negara untuk melakukan pencegahan penempatan pekerja migran dalam situasi irregular (ilegal)	Pasal 65 – 73 perihal larangan Pasal 74 perihal sanksi administratif Pasal 79 – 87 perihal sanksi pidana	UU No. 18/2017 memberikan pengaturan larangan dan sanksi termasuk untuk penegakan hukum dan pencegahan terhadap proses

				penempatan PMI yang unprosedural.
		Kewajiban negara dalam hal fasilitasi pemulangan jenazah pekerja migran dan keluarga ke negara asal	Pasal 24 ayat (1) huruf c : fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;	Telah terakomodir

Sumber: hasil data olahan peneliti pada UU No. 18 Tahun 2017 dan Konvensi untuk menemukan penerapan prinsip-prinsip konvensi secara komprehensif



Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum prinsip-prinsip konvensi telah banyak berpengaruh pada UU No. 18 Tahun 2017, mengenai ini terlihat pada beberapa hal yaitu:

1. Aspek ruang lingkup dan definisi

Konvensi dan UU No. 18 Tahun 2017 memiliki konsep rentang waktu perlindungan pekerja migran yang serupa yaitu pekerja migran haruslah dilindungi sejak sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dan pulang ke tanah air. Selain pada rentang waktu perlindungan yang sama, definisi pekerja migran pada kedua sumber hukum tersebut juga memiliki kesamaan. Keduanya juga memasukkan aspek keluarga pekerja migran sebagai bagian dari hal yang wajib diperhatikan dan dilindungi oleh negara..

2. Aspek Non Diskriminasi dalam kaitannya dengan hak

Konvensi meletakkan prinsip non diskriminasi dalam penegakkan hak pekerja migran baik itu jenis kelamin, etnisitas, agama, sementara itu pada UU No. 18 Tahun 2017 juga memasukkan prinsip non diskriminasi melalui penerapan asas-asas perlindungan pekerja migran.

3. Aspek HAM untuk seluruh pekerja migran dan keluarganya

Pada aspek ini konvensi memasukkan prinsip-prinsip mengenai anti perbudakan, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak atas kesehatan dan jaminan sosial, hak berpendapat dan kebebasan beragama. Pada UU No. 18 tahun 2017 prinsip-prinsip ini juga dapat dengan mudah ditemukan pengaturannya baik didalam konsideran, pasal-pasal dan juga penjelasan undang-undang, namun memang harus diakui tidak semua dapat diakomodir karena sebagian merupakan prinsip-prinsip yang ditujukan bagi negara tujuan penerima pekerja migran sementara Indonesia lebih tepat disebut sebagai negara pengirim pekerja migran ketimbang penerima oleh karenanya beberapa prinsip yang diatur dalam konvensi tidak masuk dalam UU No. 18 Tahun 2017 secara detail.

Adanya pengaturan mengenai hak-hak bagi keluarga PMI didalam UU No. 18 Tahun 2017 juga menjadi bukti bahwa Prinsip konvensi yang menetapkan bahwa keluarga PMI adalah hal yang tidak terpisah dari PMI

itu sendiri sehingga negara asal, negara transit dan negara tujuan wajib memberikan perlindungan bahkan reunifikasi jika diperlukan menjadi konfirmasi bahwa prinsip konvensi menjadi tolok ukur pembentukan UU No. 18 Tahun 2017.

4. Aspek hak lain bagi pekerja migran resmi dan keluarganya

Pada aspek ini konvensi memberikan prinsip tentang hak atas informasi, prosedur dan tata cara serta semua hal yang berkaitan dengan hak kerja semisal cuti, gaji, jabatan dan lain-lain, yang harus disampaikan kepada pekerja migran serta kewajiban negara dalam fasilitasi kepulangan pekerja migran serta pencegahan penempatan pekerja migran secara ilegal. UU No. 18 Tahun 2017 memasukkan prinsip terkait kewajiban penyampaian informasi mengenai prosedur dan tata cara migrasi serta hak dalam bekerja melalui pengaturan tahapan proses pelayanan secara teknis dan administratif, membagi tugas-tugas tersebut pada cabang-cabang pemerintah dari pusat, daerah sampai ke desa serta membentuk unit-unit pelaksana tugas untuk pelaksanaan fungsi tersebut melalui kantor terpadu yang disebut sebagai LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap).

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan<sup>21</sup>. Bahwa penghargaan atas harkat martabat serta HAM terpancar dalam asas perlindungan PMI sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2017 yaitu keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, nondiskriminasi, anti perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan.

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.



Disamping prinsip-prinsip konvensi yang telah diadopsi dengan cukup baik, peneliti menemukan bahwa prinsip dalam konvensi mengenai pencegahan penempatan pekerja migran ilegal oleh negara ternyata tidak maksimal di dalam UU No. 18 Tahun 2017. Menurut hemat peneliti seharusnya hal tersebut diperkuat didalam UU No. 18 Tahun 2017. Sangat disayangkan ketika pembagian tugas dan kewenangan institusional dalam perlindungan PMI tidak diikuti dengan pelibatan institusi tersebut dalam pemberantasan PMI ilegal mengingat bahwa pekerja migran menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang.

Mengenai LTSA di dalam UU No. 18 Tahun 2017 di Kabupaten dan Kota yang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pemberian informasi serta verifikasi dan pengaduan masalah sebagaimana prinsip kewajiban negara didalam konvensi, namun ternyata secara teknis masih belum bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Sebagai contoh pengamatan peneliti pada LTSA Banyuwangi, Desk-desk LTSA yang seyogyanya ditempati oleh *stakeholder* terkait seperti Imigrasi, Dinas ketenagakerjaan, sarana kesehatan, Kepolisian, lembaga keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan belum sepenuhnya lengkap terisi. PMI yang seharusnya terlayani di satu lokasi, pada kenyataannya masih harus berpindah-pindah dalam upaya memperoleh informasi maupun pemenuhan dokumen persyaratannya, hal ini terkonfirmasi dalam laporan UPT BP2MI Kantor Banyuwangi pada LTSA Banyuwangi per-Juni 2020<sup>22</sup> sebagai berikut :

**Tabel 5.6 Pelaksanaan LTSA di Banyuwangi**

NO	UNIT LTSA	CAKUPAN LAYANAN							KET
		Dinas membidangi Ketenagakerjaan Provinsi	Dinas membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota	UPT BP2MI	Imigrasi	Kesehatan /SARKES	Asuransi /BPJS	Kepolisian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	LTSA BANYUWANGI	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA Catatan : Pernah diadakan	TIDAK ADA Catatan : 1. Tidak berada di desk LTSA	TIDAK ADA	TIDAK ADA Catatan : Tidak berada di desk LTSA	TIDAK ADA	1. Surat formal terkait permintaan pengisian desk P4TKI Banyuwangi belum pernah

<sup>22</sup> Di Banyuwangi sudah dibentuk LTSA sejak 2018, data tabel adalah berasal dari laporan BP2MI Banyuwangi periode laporan Juni 2020, secara keseluruhan di seluruh wilayah Jawa Timur telah berdiri 5 LTSA, yang berjalan layak hanya 1 yaitu LTSA Surabaya dalam arti keseluruhan proses dapat dilayani di LTSA

				namun tidak ada pengajuan sehingga ditarik kembali ke kantor P4TKI Banyuwangi	tapi di Back office MPP 2. Melayani pengajuan paspor namun pengambilan harus ke kantor imigrasi yang berada di Ketapang		tapi di Back office sendiri di MPP		ada, sudah dimintakan tapi sampai dengan form ini diisi belum dipenuhi; 2. LTSA menyediakan loket bagi Stakeholder terkait, namun stakeholder tidak menempatkan petugas pada loket tersebut
--	--	--	--	---	--	--	------------------------------------	--	--

Sumber : Laporan pelayanan di LTSA Banyuwangi bulan Juni 2020 yang disusun oleh BP2MI Kantor Banyuwangi

Laporan BP2MI menyebutkan sampai dengan tahun 2020 telah berdiri 38 kantor LTSA yang terbentuk di seluruh Indonesia<sup>23</sup>, namun berdasarkan data biometrik sidik jari yang diambil ketika PMI menerbitkan E-KTKLN diketahui bahwa baru sebanyak 68.504 CPMI yang berproses di LTSA yang tersebar diseluruh Indonesia tersebut yang sebenarnya baru mencapai 25% dari total penempatan<sup>24</sup> sementara sisanya masih berproses secara terpisah.

Amanat Pasal 25 dan 28 Konvensi yang mengisyaratkan perlindungan kesehatan dan jaminan sosial bagi pekerja migran diimplementasikan oleh UU No. 18 Tahun 2017 dengan menempatkan negara untuk bertanggungjawab secara langsung melalui pembentukan sistem jaminan sosial PMI pada bagian kelima UU No. 18 Tahun 2017. Jaminan Sosial PMI dikelola oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2017 yang kemudian diikuti dengan terbitnya aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

UU No. 18 Tahun 2017 membagi tugas, fungsi dan kewenangan stakeholder dalam perlindungan PMI. Terjadi distribusi fungsi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah antara lain Pelatihan Kerja untuk pekerja migran, pengawasan, pembiayaan pekerja migran, penyelesaian masalah migran, pendataan dan pemberdayaan pekerja migran dan keluarga serta penyampaian informasi kerja.

<sup>23</sup> BP2MI, 2020, *Pointer Teleconference Kepala BP2MI kepada Kepala BP3TKI/LP3TKI pada tanggal 27 April 2020*

<sup>24</sup> *Ibid.*

## VI. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* sebagai *law making treaty* telah menetapkan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang menjadi panduan dalam pelaksanaan perlindungan kepada pekerja migran beserta keluarganya bagi negara-negara terkait. Prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya adalah Prinsip Non Diskriminasi kaitannya dengan hak pekerja migran dan keluarganya yang artinya bahwa pemenuhan hak pekerja migran tidak boleh dibeda-bedakan oleh apapun baik jenis kelamin, suku, agama, status kewarganegaraan dan lain-lain yang terdiri dari hak untuk bebas keluar dan kembali dari negara asal, hak hidup, hak dilindungi oleh negara, anti perbudakan dan kerja paksa, hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, hak beragama dan melaksanakan ibadah, hak komunikasi, hak diperlakukan sama didepan hukum, hak mendapatkan upah dan hak kerja lainnya sebagaimana yang diperoleh warga negara asli, hak atas jaminan sosial, hak atas kesehatan, hak menguasai dokumen pribadi, hak menguasai aset dan properti, hak atas informasi.
- b. Bahwa UU No. 18 Tahun 2017 telah mengadopsi prinsip dalam konvensi melalui pengaturan dalam pasal-pasal didalamnya. Prinsip non diskriminasi serta hak-hak lainnya diatur dalam penerapan asas perlindungan PMI yaitu asas keterpaduan, asas persamaan hak, asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, asas demokrasi, asas keadilan sosial, asas kesetaraan dan keadilan gender, asas non diskriminasi, asas anti perdagangan manusia, asas transparansi, asas akuntabilitas dan asas berkelanjutan, Selain disampaikan pula melalui konsideran serta penjelasan yang berisikan penghargaan kepada HAM serta prinsip non diskriminasi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dengan adanya penelitian hukum ini, Penulis berharap:

- a. Bagi pemerintah, penulis berharap agar dapat segera melengkapi aturan turunan dari UU No. 18 Tahun 2017 sebab tanpa aturan turunan yang lengkap maka pelaksanaan UU ini akan terhambat. Apalagi mengingat UU No. 18 Tahun 2017 telah memasuki tahun ke-3 dari sejak ditetapkannya. Ketidaklengkapan aturan turunan ini berpotensi besar untuk menciptakan kegamangan pada tataran pelaksana maupun masyarakat calon pekerja migran;
- b. Salah satu prinsip dalam konvensi adalah pencegahan dan penghukuman tegas terhadap oknum pemberangkatan pekerja migran secara ilegal (Konvensi Pasal 68), secara *de facto* perihal ini kurang mendapatkan porsi yang cukup dalam UU No. 18 Tahun 2017 namun penyusun berharap upaya ini harus tetap digalakkan mengingat bahwa pekerja migran adalah segmen paling rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan Indonesia termasuk negara yang banyak menempatkan warga negaranya untuk bekerja keluar negeri;
- c. Bagi Pemerintah, dengan adanya *empowering* terhadap tugas dan fungsi perlindungan pekerja migran yang dibagi rata sejak dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa maka diperlukan penyiapan aparatur yang handal dalam pelaksanaan tugas-tugas serta memahami konsep perlindungan pekerja migran;
- d. LTSA sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan hak informasi sebagaimana isi konvensi kepada pekerja migran, kedepan agar diperkuat agar penyampaian informasi kerja, tata cara dan prosedur serta persyaratan kerja keluar negeri terlaksana maksimal kepada masyarakat dan dapat menekan potensi oknum-oknum perdagangan orang untuk menipu calon pekerja migran;
- e. Visi perlindungan pekerja migran dalam pelaksanaan tugas perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta ego sektoral sebagaimana yang pernah terjadi di masa lampau, sebab peran negara menjadi dominan dalam UU No. 18 Tahun 2017 sehingga ego sektoral tentunya akan sangat merusak dan merugikan pekerja migran itu sendiri;

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional  
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Famillies* atau Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya  
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

### BUKU:

- Agusman, Damos Dumoli. 2017. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama  
Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law: An Introduction*. New York : W.W. Norton and Co.  
Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu  
Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Publishing  
Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung : Penerbit Alumni  
Mahmudji., Sri dan Soejono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo  
Starke, J.G. 2018. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Sinar Grafika

### INTERNET:

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2019, *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja.Migran.Indonesia (PMI) Tahun 2019*, dilihat pada 1 Agustus 2020, [http://ebook.bnp2tki.go.id/Ebook\\_2019/#p=1](http://ebook.bnp2tki.go.id/Ebook_2019/#p=1)  
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2020, *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode April 2020*, dilihat pada 1 Agustus 2020, [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_26-05-2020\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_APRIL\\_fix.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_26-05-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_APRIL_fix.pdf)  
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Sejarah Pekerja Migran Indonesia*, dilihat pada 1 Agustus 2020, <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>  
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015, *Perbedaan Makna Perlindungan dan Pelindungan*, dilihat pada 1 Agustus 2020, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/apa-perbedaan-makna-perlindungan-dan-pelindungan>  
Badan Pusat Statistik, 2020, *Berita Resmi Statistik 5 Mei 2020*, dilihat pada 1 Agustus 2020, [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf)

Badan Pusat Statistik, *ANALISIS STATISTIK SOSIAL: Bonus Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi*, dilihat pada 15 September 2020, <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NGMzMmFmYW4NDdjNjU2ZDRkYjZxMDQw&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMTIvMTEvMzAvNGMzMmFmYW4NDdjNjU2ZDRkYjZxMDQwL2FuYWxpc2lzlXN0YXRpc3Rpay1zb3NpYWwtLWJvbnVzLWRLbW9ncmFmaS1kYW4tcGVydHVtYnVoYW4tZWtvbm9taS0uaHRtbA%3D%3D&twoadfnearfeauf=MjAyMC0wOSxNCAXNzo1NzoxNQ%3D%3D>

United Nations Treaty Collection, 2003, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, dilihat pada 3 Agustus 2020

